



## ANALISIS BELANJA DAERAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DI KABUPATEN BANYUMAS

### Penulis Pertama<sup>1</sup>

Zumaeroh (Universitas Wijayakusuma Purwokerto)  
Zumaeroh1234@gmail.com

### Penulis Kedua<sup>2</sup>

Agus Prabawa (Universitas Wijayakusuma Purwokerto)  
Agusprabawa14@gmail.com

### Abstract

*The purpose of this research are as follows was 1) to determine the effect of income tax, retribution, wealth management outcomes separated areas and other legitimate income areas of capital expenditures amount simultaneously or amount partialy, 2) to determine which variables are dominant among income tax, retribution, wealth management outcomes separated areas and other legitimate income areas of the capital expenditures. The reseacrh, which is located at Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten Banyumas and Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas.*

*Data were collected analysis regression, according 1) to the income tax, retribution, wealth management outcomes separated areas and other legitimate income areas simultaneously significant effect of capital expenditures and to the significant effect of capital expenditures, the income tax, retribution other legitimate income areas partialy significant effect of capital expenditures, That wealth management outcomes separated areas not partialy significant effect of capital expenditures, 2) to the income tax, most dominant influence of capital expenditures.*

*Keywords: PAD, capital expenditures, Banyumas Government*

### Abstraksi

Penelitian ini memiliki tujuan untuk : 1) mengetahui pengaruh pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah Kabupaten Banyumas baik secara simultan maupun parsial, 2) untuk mengetahui faktor dominan yang berpengaruh terhadap belanja daerah. Lokasi dari Penelitian ini yaitu Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten Banyumas dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas.

Hasil penelitian menggunakan analisis regresi menunjukkan: 1) bahwa terdapat pengaruh pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh simultan positif signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Banyumas, dan terdapat pengaruh pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh parsial positif signifikan terhadap

belanja daerah Kabupaten Banyumas, sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten Banyumas, 2) factor yang dominan mempengaruhi belanja daerah Kabupaten Banyumas adalah pendapatan pajak daerah.

Katakunci :

**Kata kunci:** Belanja Daerah,;Kabupaten Banyumas: PAD

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran dalam pencapaian asset tetap serta asset lainnya yang dapat memberikan dampak positif lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikatakan, bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Lebih lanjut dikatakan, bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006). Dengan demikian APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan public yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benarbenar akan dirasakan oleh masyarakat.

Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan Negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, sebagaimana dikatakan oleh Santoso (1995:20) bahwa proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi keuangan suatu pemerintah daerah.

Dari sisi keuangan negara, kebijaksanaan pelaksanaan desentralisasi fiskal telah menimbulkan implikasi yang mendasar dalam peta pengelolaan fiskal. Artinya, dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi sumberdaya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengoptimalan tersebut harus secara tegas dicantumkan dalam APBD sebagai salah satu media utama dalam perencanaan penerimaan dan pembiayaan pembangunan di daerah. Ini berarti pengalokasian anggaran publik harus lebih diperuntukan bagi kepentingan publik misalnya, dalam hal belanja modal.

Tiga komponen APBD yaitu belanja daerah, pendapatan daerah dan pembiayaan daerah, sangat mempengaruhi keberhasilan perekonomian suatu

daerah, Jika ketiganya diolah dengan baik maka akan memberikan dampak yang baik pula bagi perekonomian daerah.

Berdasarkan beberapa hal tersebut untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi belanja daerah pemasukan dari pendapatan asli daerah maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul "Analisis Belanja Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Kabupaten Banyumas".

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah baik secara sendiri-sendiri dan bersama-sama ?
2. Variabel independen manakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap belanja daerah

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

- 1 Untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap belanja daerah Kabupaten Banyumas baik secara sendiri-sendiri dan bersama-sama.
- 2 Untuk menganalisis variabel independen yang mempunyai pengaruh dominan terhadap belanja daerah Kabupaten Banyumas.

## **TINJAUAN LITERATUR DAN HIPOTESIS**

### **1. Belanja Daerah**

Menurut Priyo (2009:4), belanja daerah pada dasarnya merupakan fungsi dari penerimaan daerah. Belanja merupakan variabel terikat yang besarnya akan sangat bergantung pada sumber sumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari penerimaan. sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat. Sehingga dalam pengukurannya jika terdapat hubungan negatif antara variabel-variabel pendapatan dengan variabel belanja, maka terdapat ilusi fiskal.

Belanja daerah menurut Pengeluaran pemerintah daerah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dipenuhi oleh swasta. Sedangkan pengeluaran pemerintah itu sendiri tidak begitu saja dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah, tapi harus direncanakan terlebih dahulu.

### **2. Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah restribusi daerah. Menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 Pajak Kabupaten/Kota dibagi menjadi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Bea Perolehan. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (budgetary) dan sebagai alat pengatur (regulatory)

### **3. Retribusi**

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu:

- a. Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayarannya atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

### **4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara atau BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok

## 5. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

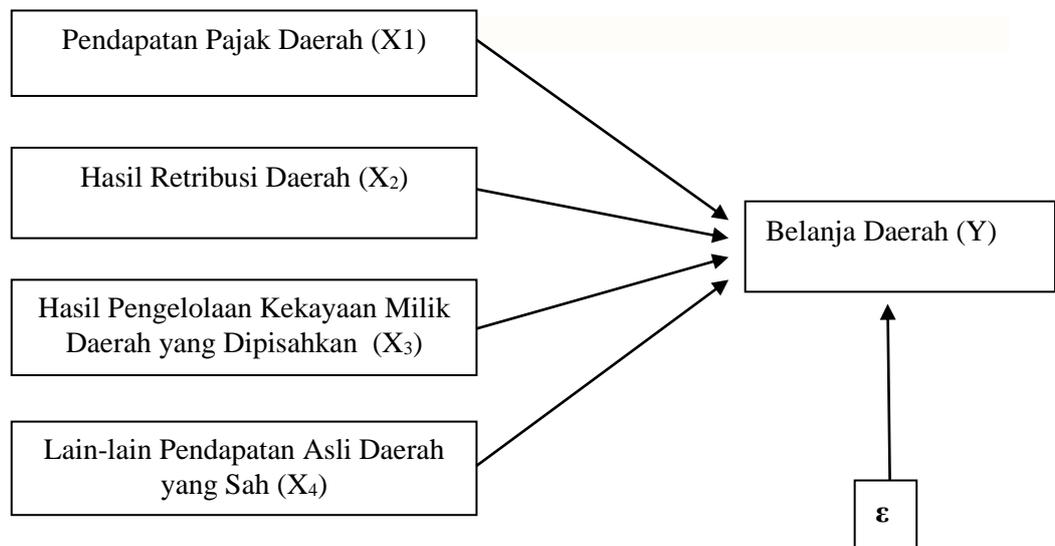
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- Jasa giro.
- Pendapatan bunga.
- Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

Menurut UU No 33 Tahun 2004, Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari :

- Pendapatan Asli Daerah
- Dana Perimbangan
- Lain-lain penerimaan yang sah

### Kerangka Pemikiran



### Hipotesis :

- Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh signifikan baik secara sendiri-sendiri dan bersama-sama terhadap belanja daerah Kabupaten Banyumas.
- Variabel independen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh dominan terhadap belanja daerah Kabupaten Banyumas.

## METODE PENELITIAN

### 1. Metode Penelitian

Sasaran penelitian ini ialah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta belanja daerah.

Metode Penelitian yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian untuk mendapatkan data yaitu menggunakan jenis metode Kuantitatif, yaitu jenis metode dalam bentuk angka (*numeric*).

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh data dari tahun 2013-2015 pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi, 2000). Sampel yang digunakan dalam pemilihan data menggunakan *nonprobability sampling* yaitu dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Data sampel diambil bulanan dari tahun 2013, 2014 dan 2015.

### 2. Metode Analisis

#### a. Analisa Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda, yang digunakan untuk menentukan besarnya koefisien dan konstanta dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan yang digunakan :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y	: Belanja daerah
$\alpha$	: Konstanta
$\beta_1 - \beta_4$	: Koefisien-koefisien regresi
$X_1$	: Pajak Daerah
$X_2$	: Retribusi Daerah
$X_3$	: Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
$X_4$	: Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
e	: <i>error</i>

#### b. Uji Asumsi Klasik

- 1). Uji Asumsi Normalitas
- 2). Uji Asumsi Multikolinieritas
- 3). Uji Asumsi Heteroskedastisitas
- 4). Uji Asumsi Autokorelasi.

#### c. Pengujian Hipotesis

- 1). Hipotesis Pertama
  - a). Pengujian pengaruh secara parsial / Uji t
  - b). Pengujian pengaruh secara simultan / Uji F
- 2). Hipotesis Kedua

Untuk mengetahui variabel independen yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap variabel dependen yaitu dengan menggunakan perbandingan nilai koefisien beta ( $\beta$ ) pada hasil regresi.

Kriteria pengujian :

- 1) Hipotesis diterima jika  $\beta X_4 > \beta X_1, \beta X_2, \beta X_3$
- 2) Hipotesis ditolak jika  $\beta X_4 \leq \beta X_1, \beta X_2, \beta X_3$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui pengaruh variabel Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan terhadap Belanja Daerah, digunakan model regresi linear berganda. Dari hasil perhitungan diperoleh perhitungan sebagai berikut :

Tabel 1

Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi ( $\beta$ )	t	Sig
Pajak Daerah (X1)	0,664	3,135	0,004
Retribusi Daerah (X2)	0,289	2,296	0,029
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan (X3)	0,005	0,230	0,820
Lain-lain Pendapatan (X4)	0,238	2,239	0,032
Konstanta	= -5,579		
R	= 0,893		
R square	= 0,797		
Adjusted R Square	= 0,771		
F <sub>hitung</sub>	= 30,435		
Signifikansi F	= 0,000		

$$Y = -5,579 + 0,664X_1 + 0,289X_2 + 0,005X_3 + 0,238X_4$$

### 2. Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Dari perhitungan pada *Model Summary*<sup>b</sup> diperoleh nilai koefisien determinasi Adjusted R square sebesar 0,771. Ini berarti bahwa 77,10% Belanja Daerah (Y) akan dijelaskan oleh variasi Pendapatan Pajak Daerah (X<sub>1</sub>), Retribusi Daerah (X<sub>2</sub>), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X<sub>3</sub>) dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah (X<sub>4</sub>) sedangkan 22,90% dijelaskan oleh faktor lain selain keempat variabel bebas tersebut.

### 3. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

diperoleh hasil Sig (2-tail = 0,974) >  $\alpha$  (0.05) maka kurva nilai residual terstandarisasi dikatakan menyebar dengan normal bahwa data berdistribusi normal dan model regresi layak dipakai.

b. Uji Multikoleniaritas

Berdasarkan *Coefficients* nilai *tolerance* dari variabel independen yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan berturut-turut (0,426, 0,312, 0,451, 0,473). Sedangkan nilai VIF adalah ( 2,345, 3,207, 2,219, 2,112). Nilai tersebut sesuai dengan syarat gejala multikoleniaritas (*tolerance* > 0,05 atau VIF < 10). Atau dengan kata lain variabel independen penelitian bebas dari gejala multikoleniaritas.

c. Uji Heteroskedasitas

Berdasarkan perhitungan Uji Heteroskedasitas diperoleh hasil uji heteroskesatisitas bahwa tidak ada variabel independen yang mempunyai gejala heteroskedastisitas karena Sign. >  $\alpha$  (0,05). Atau dilihat pada gambar 3 berikut

d. Uji Autokorelasi

Berdasarkan perhitungan Tabel 4. *Model Summary*<sup>b</sup> dihasilkan uji autokorelasi yang diperoleh setelah melakukan regresi, diketahui bahwa nilai D-W sebesar 2,026 lebih besar dari batas bawah (dL) 1,2358 dan batas atas (dU) 1,7245 serta kurang dari (4-dL) 4-1,2358 = 2,7642 (4-dU) 4-1,7245 = 2,2755. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini dinyatakan tidak ada autokorelasi.

4. Pengujian Hipotesis

a. Hipotesis Pertama

1) Uji t (Pengaruh Parsial) Untuk menguji tingkat keberartian secara parsial digunakan uji t dengan tingkat keyakinan 95% atau  $\alpha / 2 = 0,025$  dan derajat kebebasan (n-k) diperoleh hasil sebagai berikut:

a). Nilai  $t_{hitung}$  Pajak Daerah (X1) = 3,135 >  $t_{tabel}$  1,6695519 dan nilai signifikansi 0,004 < 0,05, dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah (Y) diterima ( $H_0$  ditolak).

b). Nilai  $t_{hitung}$  Retribusi Daerah (X2) = 2,296 >  $t_{tabel}$  1,6695519 dan nilai signifikansi 0,029 < 0,05, dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan bahwa retribusi daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah (Y) diterima ( $H_0$  ditolak).

c). Nilai  $t_{hitung}$  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X3) = 0,230 >  $t_{tabel}$  1,6695519 dan nilai signifikansi

0,820 > 0,05, dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

- d). Nilai  $t_{hitung}$  Lain-lain Pendapatan (X4) = 2,239 >  $t_{tabel}$  1,6695519 dan nilai signifikansi 0,032 < 0,05, dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan bahwa Lain-lain Pendapatan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah (Y) diterima ( $H_0$  ditolak).

## 2). Uji F ( Pengaruh Simultan)

Dari perhitungan Rekapitulasi Regresi Linier Berganda bahwa variabel Pendapatan Pajak Daerah ( $X_1$ ), Retribusi Daerah ( $X_2$ ), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan ( $X_3$ ) dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah ( $X_4$ ) berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Y) secara simultan atau bersama-sama menunjukkan hasil nilai  $F_{hitung} = 30,435 > F_{tabel} 2,678667$  dengan Signifikan F sebesar 0,000 < 0,05 (5%), sehingga menolak  $H_0$ . Hasil ini menyatakan bahwa secara simultan semua variabel bebas yaitu Pendapatan Pajak Daerah ( $X_1$ ), Retribusi Daerah ( $X_2$ ), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan ( $X_3$ ) dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah ( $X_4$ ) berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Y). Berikut adalah gambar grafik uji

### b. Hipotesis Kedua

Dari Rekapitulasi Regresi Linier Berganda dapat diketahui variabel independen yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap variabel dependen yaitu variabel pajak daerah ( $X_1$ ) yang mempunyai nilai koefisien beta ( $\beta$ ) 0,664 lebih besar dari variabel Retribusi Daerah ( $X_2$ ) yaitu 0,289, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan ( $X_3$ ) yaitu 0,005 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah ( $X_4$ ) yaitu 0,238.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

1. Hasil analisis regresi diperoleh persamaan sebagai berikut:  
$$Y = -5,579 + 0,664X_1 + 0,289X_2 + 0,005X_3 + 0,238X_4$$
2. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut :
  - a. Secara parsial variabel Pajak Daerah ( $X_1$ ), Retribusi Daerah ( $X_2$ ), dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ( $X_3$ ) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (Y) dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan  $P_{value} < 0,005$ . Sedangkan variabel Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tidak berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Daerah dengan nilai nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan  $P_{value} > 0,005$ .
  - b. Secara simultan variabel Pajak Daerah ( $X_1$ ), Retribusi Daerah ( $X_2$ ), dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ( $X_3$ ) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (Y) dengan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan  $P_{value} < 0,05$ .

3. Variabel Pajak Daerah merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi Belanja Daerah karena variabel pajak daerah ( $X_1$ ) mempunyai nilai koefisien beta ( $\beta$ ) 0,664 lebih besar dari variabel Retribusi Daerah ( $X_2$ ) yaitu 0,289, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan ( $X_3$ ) yaitu 0,005 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah ( $X_4$ ) yaitu 0,238

### **Keterbatasan**

Penelitian ini di batasi pada masalah mengenai pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap belanja daerah Kabupaten Banyumas dengan mengambil sampel data bulanan tahun 2013-2015.

### **Saran Untuk Penelitian Selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan hasil penelitian ini

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alexiou , Constantinos, 2009. *Government Spending and Economic Growth: Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SEE)*. Journal of Economic and Social Research, Vol 1 page 1-16.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Askam, Tuasikal. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal telaah & riset akuntansi* Vol. 1, No. 2. Juli 2008 Hal.142-155.
- Bbchuk, Lucian A. 2008. *A Plan For Addressing The Financial Crisis*. Journal The Voice ekonom, Vol. 5, Issue 5 (September 2008). Harvard Law School Cambridge, MA02138.
- Edision, Henri. 2010. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Toba Samosir. Medan : Universitas Sumatera Utara. Skripsi tidak dipublikasikan.
- Guy, Clifford. 1998. *The impress of planning policies in Western Europe*. Journal Cntrolling new retail spaces Vol. 5 No. 35 page 953 London : Urban Studies.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat* :Jakarta.
- Heryanto, Andrian. 2016. "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)". Yogyakarta : Universitas PGRI Yogyakarta. Skripsi tidak dipublikasikan.
- Hyman, D.N. 1996. *Public Finance, A Cotemporary Application of Theory to Policy*. Fifth edition, Journal Vol. 3. The Driden Press : New York.
- Ilyas, M. 1989. *Ilmu Keuangan Negara (Public Finance)*, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Dirjen Pendidikan Tinggi, Depdikbud : Jakarta
- Khawaldah, Hamzah. 2012. *The Town Planning Review*. Journal Author Information. Vol. 2 Page 233-260. Liverpool.

- Mangkusubroto, G. 2000. *Ekonomi Publik*. Journal Ekonomi Publik Vol. 3 No. 9, BPFE-UGM : Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi.
- Mnenwa, Raymond. 2009. *Assessing Institutional Promoting Framework Growth Of MSE in Tanzania : Case Dar Es Salaam*. Jurnal Research on Poverty Alleviation (REPOA)
- Musgrave, RA dan Musgrave, PB. 1984. *Public Finance In Theory and Practice*. Journal Vol. 2. McGraw-Hill, Inc : New York, USA.
- Purpitasari, Puput. 2015. Penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah. jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 4 No. 11. Surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIEI).
- Pratomo, Yulius Agus Linggaus. 2014. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Dan Lain-lain PAD Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Bantul. Yogyakarta : Universitas Shanata Dharma. Skripsi tidak dipublikasikan.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Sekretariat Negara : Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara : Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara : Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sekretariat Negara : Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan*. Sekretariat Negara : Jakarta.
- Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko, M. 1986. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. BPFE-UGM : Yogyakarta